

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DIGITAL GOVERNANCE DALAM BENTUK INOVASI POTENSI DESA DI DESA WINDURAJA KECAMATAN KAWALI KABUPATEN CIAMIS

Muhammad Farhan Firmansyah¹, Vinka Andiniesa², Gantini², Dian Dwi Tistari³

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia^{1,2,3}

E-mail : firmasyahmuhammadfarhan@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dari hasil observasi yang menentukan beberapa permasalahan dalam Implementasi Kebijakan Digital Governance Dalam Bentuk Inovasi Potensi Desa Di Desa Winduraja Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis diantaranya : (1) Belum adanya standarisasi yang jelas tentang implementasi e-governance dan sosialisasi tentang bagaimana penyelenggaraan situs pemerintah daerah yang riil dan ideal. (2) Belum tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang memadai atau minim dari segi skill dan manajerial. (3) Masih mahal nya sarana dan prasarana teknologi ICT (Information and Commutication). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Penelitian yang dilakukan selama 1 bulan. Teknik pengambilan data yang dilakukan adalah studi kepustakaan (literature studi) dan studi lapangan berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Implementasi Kebijakan Digital Governance Dalam Bentuk Inovasi Potensi Desa Di Desa Winduraja Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis belum sepenuhnya optimal, karena belum adanya standarisasi yang jelas tentang implementasi e-governance dan sosialisasi tentang bagaimana penyelenggaraan situs pemerintah daerah yang riil dan ideal, belum tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai atau minim dari segi skill dan manajerial serta masih mahal nya sarana dan prasarana teknologi ICT (Information and Commutication) masih belum meratanya literacy masyarakat yang berkaitan dengan pemanfaatan e-governance karena mayoritas penduduk berada pada garis golongan menengah ke bawah.

Kata Kunci: *Implementasi, Kebijakan, Governance*

ABSTRACT

This research is motivated by observations that determine several problems in the Implementation of Digital Governance Policies in the Form of Village Potential Innovations in Winduraja Village, Kawali District, Ciamis Regency, including: (1) There is no clear standardization of the implementation of e-governance and socialization about how to organize local government sites. the real and the ideal. (2) The lack of adequate or minimal human resources (HR) in terms of skills and managerial. (3) The high cost of ICT (Information and Communication) technology facilities and infrastructure. The research method used in this research is descriptive analysis method with a qualitative approach. Research conducted for 1 month. Data collection techniques used are literature studies and field studies in the form of observations, interviews and documentation. Implementation of Digital Governance Policies in the Form of Village Potential Innovations in Winduraja Village, Kawali District, Ciamis Regency is not yet fully optimal, because there is no clear standardization of the implementation of e-governance and socialization of how to implement real and ideal local government sites, and the unavailability of human resources. Human resources) that are adequate or minimal in terms of skills and managerial as well as the still expensive facilities and infrastructure of ICT (Information and Communication) technology are

still not evenly distributed in public literacy related to the use of e-governance because the majority of the population is in the lower middle class line.

Keywords: *Implementation, Policy, Governance*

PENDAHULUAN

Berubahnya paradigma dunia yang mendudukan desa sebagai bagian penting dalam globalisasi, turut mendorong Indonesia untuk segera mengubah sudut pandangnya akan desa. Berkaitan dengan hal itu pula, maka Pemerintah memberikan penegasan untuk memaksimalkan pembangunan desa dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang ini menjadi pedoman penting untuk menjelaskan status dan bentuk desa secara riil dalam konstelasi penyelenggaraan pemerintahan. Apa yang diharapkan di kemudian hari yakni desa yang tidak hanya menjadi bagian dari demokrasi dalam skala kecil (*shadow government*), tetapi juga berkesempatan menjadi pemeran utama dalam pembangunan nasional.

Undang-Undang tentang Desa mengamanatkan bahwa hakikat pembangunan desa merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, pembangunan desa harus melibatkan masyarakat desa dalam pola pemberdayaan (Kumolo, 2017 : 215). Pelaksanaan program-program pembangunan desa merupakan upaya perubahan sosial yang bertujuan merubah seluruh aspek kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik dengan sasaran pokok menciptakan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Banga (2018 : 138-139), bahwa “prinsip dasar pembangunan desa adalah menekankan perubahan dan perkembangan dalam semua aspek kehidupan masyarakat, baik yang sifatnya fisik maupun non fisik menuju pemerataan pembangunan yang berkeadilan sosial” Guna mewujudkan pembangunan desa yang merata, dibutuhkan kreativitas dan inovasi pada semua ini. Apalagi ketimpangan Pembangunan baik fisik maupun SDM antara wilayah perdesaan dengan perkotaan masih tinggi. Karena keterbatasan kapasitas itulah, kebanyakan desa di Indonesia belum mampu mengelola dana desa untuk

menciptakan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan demikian, Program Inovasi Desa (PID) yang diluncurkan Kementerian Desa PDTT diharapkan mampu mendorong Pemerintah Desa menjadi lebih kreatif dan inovatif mengembangkan potensi lokal untuk mempercepat pembangunan Desa dan penanggulangan kemiskinan.

Perkembangan zaman telah menuntut kita agar senantiasa bisa bergerak maju menjadi lebih baik lagi. Sebagai suatu instansi Pemerintah daerah yang baik, tentu nya sangat perlu untuk melakukan sebuah inovasi guna kemajuan daerah itu sendiri. Inovasi tersebut tak lepas dari sebuah teknologi informasi dan komunikasi, seperti yang kita lihat bahwa sekarang segala sesuatu pasti berhubungan dengan teknologi informasi dan komunikasi.

Dengan berdampingannya sebuah inovasi yang tak lepas dari teknologi, maka inovasi tersebut akan sangat mudah di jalankan. Teknologi menjadi salah satu jalan untuk mengimplementasikan sebuah ide guna menciptakan sebuah inovasi.

Sebuah inovasi dalam suatu instansi pemerintah daerah akan berpengaruh terhadap sumber daya baik alam maupun manusia nya. Inovasi dan teknologi yang baik akan sangat menguntungkan bagi sekitarnya.

KAJIAN PUSTAKA

Sebuah implementasi kebijakan, digital *governance*, dan inovasi tentu nya memiliki arti yang berbeda-beda. Pengertian implementasi, Kadir menyampaikan konsep implementasi berpendapat bahwa merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menguji data dan menerapkan sistem yang dikumpulkan dari kegiatan seleksi.

Fullan mengemukakan bahwa pengertian implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan ide, program atau seperangkat aktifitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan.

Berdasarkan pengertian dari kedua ahli di atas, dapat di simpulkan bahwa implelementasi adalah

suatu proses, untuk menilai, mengevaluasi dan mengukur apakah suatu peraturan atau kebijakan dapat berjalan dengan baik atau tidak, dengan begitu maka akan di nilai apakah harus ada evaluasi atau tidak terhadap program tersebut.

Istilah kebijakan memiliki banyak makna, kebijakan menunjuk pada serangkaian tindakan yang bertujuan. Friedrich mengartikan kebijakan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang di usulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan seraya mencari peluang untuk mencapai tujuan atau sasaran yang di inginkan (Widodo 2007:13)

Post, et al (1999) memaknai kebijakan sebagai rencana tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk mencapai tujuan yang lebih luas yang memengaruhi kehidupan penduduk negara secara substansial. Dari beberapa pandangan tentang kebijakan tersebut, dapat di tarik kesimpulan bahwa suatu kebijakan pasti berkaitan dengan rencana tindakan yang diarahkan untuk mewujudkan tujuan tertentu.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan dari proses kebijakan segera setelah penetapan Undang-Undang. Ripley dan Franklin (dalam Winarno 2007:145), Implementasi Kebijakan adalah apa yang terjadi setelah Undang-Undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau jenis keluaran yang nyata (*tangible output*).

Warwick sebagaimana dikutip Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti (2012) menyebutkan implementasi kebijakan sebagai transaksi sumber daya. Untuk menjalankan program, implementator harus berhubungan dengan tugas-tugas, lingkungan, klien, dan kelompok terkait.

Dari berbagai pendapat diatas, dapat di tarik kesimpulan bahwa Impelementasi Kebijakan merupakan kegiatan untuk menjalankan kebijakan, yang ditujukan kepada kelompok sasaran, untuk mewujudkan tujuan kebijakan.

Inovasi biasanya erat kaitannya dengan lingkungan yang berkarakteristik dinamis dan berkembang. Menurut Rogers, Inovasi adalah sebuah ide, praktek, atau objek yang dianggap baru oleh individu satu unit adopsi lainnya.

Menurut Huberman (1973), Inovasi adalah proses kreatif dalam memilih, mengorganisasi, dan memanfaatkan sumber daya manusia dan material dalam cara-cara baru atau dan unik yang akan menghasilkan pencapaian lebih tinggi untuk tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dari beberapa pendapat para ahli diatas, dapat di tarik kesimpulan bahwa Inovasi adalah suatu ide, hal-hal yang praktik, metode, cara, dan barang-barang buatan manusia yang diamati atau dirasakan sebagai suatu yang baru bagi seseorang atau kelompok orang.

Digital governance atau sering juga disebut sebagai *e-Governance*, secara sederhana diartikan oleh Budhiraja (2002) sebagai memberikan warga negara pilihan terhadap kapan dan di mana mereka mengakses informasi dan pelayanan pemerintah. Menurut Budhiraja, ada 3 (tiga) fundamental isu yang muncul dalam menciptakan *e-Gov*, yaitu isu teknologi, isu manajemen perubahan, dan isu pendanaan.

METODE

Peneliti ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, menurut Sugiyono (2017 : 9) “pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat *postpositivisme* atau *enterpretatif*, digunakan untuk meneliti kondisi objek yang ilmiah, dimana peneliti adalah indikator kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara dan dokumentasi), data yang diperoleh cenderung kualitatif, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkonstruksi fenomena dan menemukan hipotesis”.

Penelitian ini juga didesain untuk memperoleh informasi yang objektif. Penelitian ini difokuskan pada Implementasi Kebijakan Digital *Governance* Dalam Bentuk Inovasi Potensi Desa Di Desa Winduraja Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis.

Dalam penelitian Kualitatif, sampel dan instrument dipilih secara *purposive* sampling dimana pengambilan sampel, sumber data dengan pertimbangan tertentu, seperti orang tersebut dianggap paling tau tentang apa yang kita harapkan. (Sugiyono 2006). Pemilihan sampel diambil dari

Kepala Desa Winduraja, Sekretaris Desa Winduraja dan Staf Desa Winduraja.

Adapun informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa Winduraja
2. Sekretaris Desa Winduraja
3. Staf Desa Winduraja

Sumber data

Berdasarkan sumbernya data dibagi menjadi 2, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak yang pertama. Sedangkan data sekunder merupakan sumber data riset yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang tersusun dalam arsip, baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan (Lubis, 2010:175).

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer : Data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian dan membutuhkan pengelolaan lebih lanjut, seperti hasil wawancara dengan pihak pemerintah desa.
- b. Data Sekunder : Data yang diperoleh dari pihak-pihak yang tidak berkaitan langsung dengan penelitian, seperti artikel dan buku-buku literatur yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti yang berhubungan dengan Implementasi Kebijakan *Digital Governance* Dalam Bentuk Inovasi Potensi Desa Di Desa Winduraja Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Teknik wawancara, yaitu dengan mengadakan tanya jawab langsung dengan pihak pemerintah desa
- b. Teknik Dokumentasi, yaitu meneliti bahan-bahan tulisan pemerintah desa dan dokumen pemerintah yang berhubungan dengan penelitian
- c. Mengumpulkan informasi melalui buku-buku

yang memiliki hubungan dengan *e-government* dan pelayanan publik untuk digunakan sebagai teori dalam melengkapi penyusunan jurnal.

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan metode induktif. Dimana penelitian ini bermaksud membuat “ penyenderaan” secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu.

Metode deskriptif yaitu memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan yang diteliti. Dimulai dengan mengumpulkan data, diklasifikasikan, dianalisis kemudian diinterpretasikan. Pendekatan kualitatif mengikuti metode induktif dimulai dengan data empiris, diikuti dengan berbagai ide abstrak, dilanjutkan dengan menghubungkan ide dengan data, dan diakhiri dengan menggabungkan, ide dengan data sehingga lebih interaktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Desa Winduraja, Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis

Desa Winduraja merupakan sebuah Desa yang termasuk kedalam Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Desa Winduraja ini merupakan Desa Induk (belum mengalami pemekaran Desa) karena dulunya hanya ada kapunduhan Kawali dan kapunduhan Winduraja. Winduraja berasal dari kata “Windu” yang artinya 8 (delapan) dan “Raja” berarti pemimpin. Dulu Desa Winduraja ini bernama Winduraja Kolot, nama ini tertulis pada naskah carita Parahiangan, pada saat itu pusat pemerintahan Winduraja Kolot berada di daerah Sindang Balong yang lokasinya dikelilingi oleh gunung.

Menurut cerita masyarakat, di Winduraja pernah diadakan acara "ngawindu" yang artinya tempat berkumpul atau musyawarah, di area komplek pemakaman Argadinata Sindang Balong. Dahulunya raja-raja sepulau jawa berkumpul yang ditandakan adanya makam yang dinamakan Raja Agung sepulau jawa dan ada batu meja. Menurut sesepuh winduraja H. Mausul mengatakan waktu beliau masih kecil, desa Winduraja sering didatangi oleh Presiden RI yang pertama yaitu Ir. Soekarno menjelang setiap hari kemerdekaan yang bermaksud tawasulan kemakam-makam keramat

yang ada di Winduraja. dan pernah petinggi-petinggi TRI berkumpul di Winduraja untuk bermusyawarah.

Saat ini Desa Winduraja dipimpin oleh Kepala Desa yaitu Bapak Endang Suryaman, yang mana beliau sudah 3 periode menjabat sebagai Kepala Desa di Desa Winduraja, meskipun pada tahun 2019 mengalami perubahan sementara. Desa Winduraja memiliki 6 Dusun yang mana setiap dusunnya memiliki jumlah RW dan RT yang sama, sedangkan yang berbeda hanya dua Dusun. Diantaranya; Dusun Weningsari memiliki 2 RW yang didalamnya terdapat 6 RT, sama seperti Dusun Weningsari, Dusun Margajaya juga memiliki jumlah RW dan RT yang sama. Sedangkan Dusun Sukamulya memiliki Jumlah Rw terbanyak yaitu 3 RW dan memiliki 7 RT. Selanjutnya Dusun Sukajadi, Dusun Sukahurip dan Dusun Hayawang memiliki jumlah RW masing-masing 2 dengan jumlah RT 7.

Wilayah Desa Winduraja dialiri oleh sungai Cimuntur yang merupakan sungai terbesar yang menjadi batas wilayah Desa. Bahkan Desa Winduraja terbagi 2 oleh sungai Cimuntur ini, sehingga dari setiap sudut wilayah Desa Winduraja akan terlihat aliran sungainya. Wilayah Desa Winduraja memiliki iklim kemarau dan penghujan, yang mana hal ini mempengaruhi terhadap pola tanaman yang ditanam di lingkungan setempat, dikaruniai keadaan tanah yang subur serta udara yang bersih dan segar, rata-rata suhu di Desa Winduraja sekitar 20-29°C dengan curah hujan 2000/3000 mm, sehingga membuat tanaman yang ditanam di Desa Winduraja ini tumbuh dengan subur.

Inovasi Potensi Desa di Desa Winduraja, Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis

Salah satu potensi desa yang dimiliki oleh Desa Winduraja ini adalah objek wisata Situwangi. Situwangi merupakan danau alam yang sudah ada sejak zaman dahulu. Situwangi ini terletak di Dusun Hayawang, Desa Winduraja, Kecamatan Kawali, 20 km dari Kota Ciamis. Memiliki potensi pariwisata yang cukup memadai untuk terus dikembangkan menjadi suatu destinasi wisata potensial.

Luas area Situwangi ini diperkirakan hingga 5 hektare. Fasilitas yang tersedia di Situwangi saat ini adalah adanya pintu gerbang, jalan masuk ke objek wisata, gazebo, sepeda wisata, area pemancingan, mushola, dan lahan parkir.

Berbicara tentang inovasi, objek wisata Situwangi ini akan melakukan penataan tambahan untuk kedepannya seperti pembangunan jogging track, pelebaran jalan masuk, penambahan gazebo, pembangunan food court, pembangunan taman, menara selfie, dan lain-lain sebagainya. Penataan tersebut sudah dalam tahap proses dan diperkirakan akan beres dalam waktu 2022 nanti. Penataan ini dilakukan untuk menjadikan Situwangi menjadi wisata yang sangat menarik di wilayah Priangan Timur.

Selain beberapa fasilitas yang dimiliki, di sekitaran objek wisata Situwangi ini juga terdapat salah satu makam keramat leluhur, makam keramat tersebut merupakan makam keramat Eyang Suba. Menurut cerita, Eyang Suba adalah salah satu leluhur yang memelihara atau menjaga Situwangi, tidak jauh dari Situwangi ada pasir bubuluk yang dulunya disebut Pasir Panyawangan. Nama Dusun Hayawang terinspirasi dari kata Pasir Panyawangan yang artinya tempat untuk nyawang atau melihat pemandangan alam sekitarnya.

Makam keramat Eyang Suba ini terletak di atas bukit Situwangi, di mana track jalan untuk menuju kesana sangat sulit dan curam karena jalan tersebut masih tanah, belum lagi tanaman-tanaman liar yang tumbuh menghalangi jalan dan tingginya lokasi makam tersebut. Sehubungan dengan bersamanya penataan objek wisata Situwangi ini, pihak pemerintahan berencana akan membuatkan jalan yang bagus juga aman untuk menuju makam keramat tersebut. Karena tidak hanya orang-orang sekitar yang datang ke makam tersebut, banyak juga orang-orang dari luar daerah yang datang untuk ziarah ke makam tersebut.

Objek wisata Situwangi ini akan menjadi sebuah destinasi multifungsi. Mulai dari ketersediaan air baku, rekreasi, wisata legenda hingga olahraga. Situwangi ini juga biasa digunakan oleh para atlet dayung atau kayak untuk berlatih bahkan tak jarang pula dipakai untuk *event* lomba dengan peserta dari berbagai daerah di Jawa

Barat, lomba ini juga dijadikan sebagai ajang seleksi atlet untuk persiapan di ajang Perda Jabar mendatang. *Event* ini disebut sebagai Pesta Wangi.

Implementasi Kebijakan Digital Governance dalam Inovasi Potensi Desa Winduraja, Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis

Di era globalisasi ini tentu nya kita tidak bisa lepas dari sebuah teknologi. Teknologi telah digunakan oleh semua kalangan mulai dari masyarakat, pejabat, hingga pemerintahan. Kebijakan digital *governance* atau biasa disebut *e-governance* merupakan proses pemanfaatan teknologi sebagai alat untuk membantu menjalankan system pemerintahan secara lebih efisien.

Terdapat beberapa faktor yang menghambat berkembangnya *e-governance* di Indonesia ini, antara lain :

1. Belum adanya standarisasi yang jelas tentang implementasi *e-governance* dan sosialisasi tentang bagaimana penyelenggaraan situs pemerintah daerah yang riil dan ideal.
2. Belum tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang memadai atau minim dari segi skill dan manajerial.
3. Masih mahal nya sarana dan prasarana teknologi ICT. (*Information and Commutication*) masih mahal nya sarana dan prasarana teknologi ICT (*Information and Commutication Technology*). Masih belum meratanya *Literacy* masyarakat yang berkaitan dengan pemanfaatan *e-governance* karena mayoritas penduduk berada pada garis golongan menengah ke bawah.

Berbicara mengenai *e-governance*, Desa Winduraja telah mengimplementasikan kebijakan digital *governance* ini dengan pembuatan *website* desa. Sebelum nya Desa Winduraja belum memiliki *website*, namun akhirnya di bantu oleh kita sebagai Kelompok Praktek Sistem Pemerintahan Desa untuk pembuatan *website* desa. Meskipun sebenarnya perangkat desa kurang memahami penting nya *website* bagi pengembangan desa, tetapi mereka mau berusaha untuk mempelajari segala sesuatu yang berkenaan

dengan *website* ini.

Website desa merupakan sebuah situs yang berisikan kumpulan informasi tentang desa baik dalam bentuk tulisan, gambar, suara, atau video yang dapat diakses melalui jaringan seperti internet (online). Pengembangan desa melalui *website* belum banyak dilakukan oleh beberapa desa di Kabupaten Ciamis salah satunya di Desa Rancah. Pembuatan *website* desa didasari oleh Undang-undang no 12 tahun 2014 atau yang biasa disebut dengan UU Desa.

Ada beberapa tujuan dari *website* desa yaitu :

1. Publikasi keberadaan desa keseluruh dunia.
2. Menginformasikan profil dan seluruh potensi desa.
3. Mempermudah masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai desa, sebagai bentuk keterbukaan informasi publik, masyarakat dapat memberikan dan mendapatkan informasi dengan cepat tanpa hambatan apapun, dalam rangkaian percepatan pembangunan desa.
4. Program-program desa, Foto-foto kegiatan desa, Video pun dapat diakses di seluruh dunia.
5. Pengumuman desa, dapat diakses dengan mudah oleh seluruh warga desa yang ada di seluruh indonesia bahkan yang sedang merantau ke luar negeri.
6. Berita terkini program desa, dapat memberkan informasi ke publik berbagai aktivitas pembangunan desa sehingga bersinergi dengan gerak langkah pembangunan di Kabupaten.

Dalam pengumpulan data untuk pembuatan *website*, terdapat beberapa kendala yang salah satunya adalah ketidaksinkronan data yang di peroleh dari pihak satu dengan pihak lainnya, hal itu menjadikan kita sebagai Kelompok Praktek Sistem Pemerintahan Desa untuk harus lebih teliti dan mencari tahu lebih dalam untuk memastikan data-data tersebut. Adapun beberapa hal dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk pembuatan *website* ini, di antara nya :

1. Pendaftaran mail.go.id

Sebelum melakukan pembuatan *website*, langkah yang harus dilakukan pertama yaitu pendaftaran mail.go.id. Melalui portal layanan kominfo, langkah pendaftaran mail.go.id yaitu

mendaftarkan akun ke situs layanan kominfo.go.id dengan menggunakan gmail resmi desa serta passwordnya. Kemudian langkah selanjutnya menunggu verifikasi yang akan dikirim ke email tersebut, setelah itu melengkapi formulir dengan mengunggah persyaratan surat keputusan (SK) kepala desa dan juga perangkat desa sebagai salah satu syarat pengajuan permohonan mail.go.id.

2. Pengajuan domain desa.id

Yang kedua, setelah melakukan pendaftaran mail.go.id jika sudah terverifikasi kemudian langkah selanjutnya yaitu pengajuan domain desa.id dengan melampirkan surat keputusan (SK) kepala desa, surat keputusan (SK) perangkat desa, surat kuasa, surat permohonan dan fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) dari kepala desa sebagai beberapa syarat untuk yang digunakan untuk mengajukan domain desa.id.

KESIMPULAN

1. Desa Winduraja ini merupakan Desa Induk (belum mengalami pemekaran Desa) karena dulunya hanya ada kapunduhan Kawali dan kapunduhan Winduraja.
2. Desa Winduraja sedang melakukan penataan objek wisata Situwangi guna mengembangkan potensi desa dan menjadikan Situwangi sebagai sebuah wisata yang lebih menarik, dengan begitu maka Desa Winduraja akan lebih maju.
3. Objek wisata Situwangi bisa menghasilkan para atlet dayung hebat guna persiapan Perda Jabar melalui *event* lomba yang sering

diselenggarakan dengan sebutan Pesta Wangi.

4. Implementasi kebijakan digital governance di Desa Winduraja telah di laksanakan walaupun dalam proses pengajuan *website* memerlukan waktu yang cukup lama.

DAFTAR PUSTAKA

- Handoyo, Eko. 2012. *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya.
- Katharina, Riris. Na Endi, Robert. 2020. *Pelayanan Publik Dan Pemerintahan Digital Indonesia*. Desain Sampul: Masugeng.
- Rahmat, Diding. 2017. *Jurnal Unifikasi. Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kabupaten Kuningan*. Vol. 04 Nomor 01 Januari 2017. ISSN 2354- 5976.
- Ribuwati. Suryanti, Irmidkk. 2018. *Inovasi Pendidikan*. Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT).
- Setiawati, Willia. Rumapea, Patar. *Implementasi Kebijakan E-Government Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat*.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suwarno, Yogi. 2008. *Inovasi Di Sektor Publik*. Hal 1-19.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa